



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**PERUBAHAN  
RENCANA KERJA (RENJA)  
KECAMATAN GUNUNGJATI  
TAHUN 2023**

**DESA KLAYAN KECAMATAN GUNUNGJATI  
KABUPATEN CIREBON**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon tahun 2023 merupakan penjabaran Visi, Misi, Bupati Cirebon yang disesuaikan dengan tujuan Provinsi Jawa Barat dan Nasional namun tetap bernuansa kedaerahan. Dalam hal ini Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon sebagai Perangkat Daerah mempunyai Tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan.

Secara umum materi Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunungjati tahun 2023 berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaiannya. Adapun Tujuan Kantor Kecamatan Gunungjati yaitu Meningkatnya Produktivitas Masyarakat untuk Lebih Maju dan Unggul, sehingga menambah daya saing di Pasar Internasional, Nasional dan Regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah.

Akhirnya semoga Perubahan Rencana Kerja Perubahan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam pelaksanaan berbagai program kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 guna pencapaian dan sasaran dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Gunungjati, Juni 2023

**CAMAT GUNUNGJATI**

**H. ABDUL AJID, S.Sos.**

Pembina Tk.I

NIP. 19690823 199009 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Gunungjati Tahun 2023 .....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Gunungjati Sampai dengan Semester 1 Tahun 2023 .....	6
2.1.1. Evaluasi dan Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	6
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunungjati.....	15
2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Gunungjati .....	17
2.4. Penelaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat .....	19
BAB III Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023.....	21
3.1. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah .....	21
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Tengahtanni .....	22
4.1. Program Dan Kegiatan Tahun 2023 .....	22
BAB V Penutup .....	31
5.1. Catatan penting .....	31
5.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan .....	32
5.3. Rencana Tindak Lanjut .....	32

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunungjati Tahun 2023

## **BAB I PENDAHULUAN**

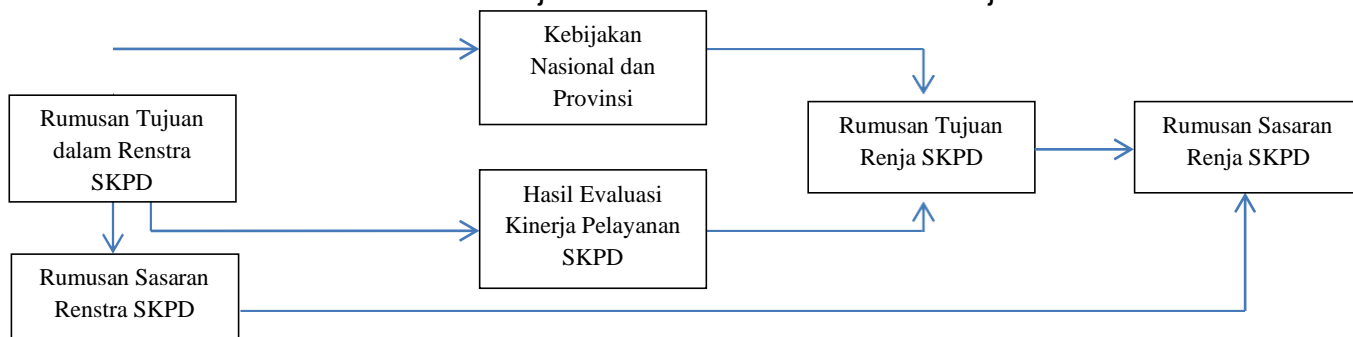
### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai Ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan jangka panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan jangka menengah Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Gunungjati Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk Tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah perangkat daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu perangkat daerah, perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunungjati Tahun 2023 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Perubahan Rencana Kerja menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gunungjati mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Gunungjati Tahun 2019-2024 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan adanya acuan diatas, perubahan rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya perubahan rencana kerja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD perubahan Kabupaten Cirebon.

## Perumusan Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja



Rencana Kerja Kecamatan Gunungjati memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kegiatan serta Sub Kegiatan dari Renstra Kecamatan Gunungjati, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan.

### 1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);
- n. Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 54 Seri E);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6 seri D.5);

- p. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 Seri D.6);
- q. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 98, Seri E.75);
- r. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon (RPJMD) Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 Seri E);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Seri D (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 Seri D);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021);
- u. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022);
- w. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 101 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 101);
- x. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 184 Tahun 2022).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Gunungjati Tahun 2023 ini adalah:

1. Merupakan suatu dokumen perubahan perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam merencanakan perubahan anggaran
2. Merupakan suatu alat untuk mengukur kinerja instansi yang efektif, berkelanjutan
3. Merupakan pedoman arah dalam mencapai sasaran, keluaran dan dampak terhadap kinerja yang akan dilaksanakan
4. Merupakan gambaran terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki

5. Untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar mencapai target dan agar sinkron dengan visi dan misi pemerintah daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gunungjati Tahun 2023 dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Gunungjati Sampai Dengan Semester 1 Tahun 2023**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Gunungjati Sampai dengan Semester 1 Tahun 2023
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Gunungjati

##### **BAB III Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2023**

- 3.1. Tujuan Dan Sasaran Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Gunungjati

##### **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Gunungjati**

- 4.1. Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

##### **BAB V PENUTUP**

- 5.1. Catatan Penting
- 5.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut



**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN**  
**KECAMATAN GUNUNGJATI TAHUN 2021**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Gunungjati Sampai dengan Semester 1 Tahun 2023**

**2.1.1. Evaluasi dan Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di wilayah kerja Kecamatan. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Gunungjati Tahun 2023 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2023, realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Gunungjati, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel terlampir.

Kecamatan Gunungjati melaksanakan 2 (dua) program anggaran belanja yaitu untuk anggaran belanja operasional dan anggaran belanja modal. Pelaksanaan kegiatan urusan yang melekat pada SKPD (operasional) pada Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan melalui Satu (1) Program, Tujuh (7) Kegiatan, dan Dua Puluh (20) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.638.793.200,- dengan capaian realisasi semester I sebesar Rp.1.258.649.268,- (47,7%) dan sisa anggaran belum terserap sebesar Rp.1.380.143.932,- (52,3%) yang merupakan sisa.

Berikut ialah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Pada Tahun Anggaran 2023 Semester 1.

**Pendapatan dan Belanja Kecamatan Gunungjati  
Tahun Anggaran 2023 Semester 1**

Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut:

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-	-	-
5.	BELANJA	2.638.793.200			
5.1.	BELANJA OPERASI	2.628.364.200			
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	2.212.646.100			
5.1.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	415.718.100			
5.2.	BELANJA MODAL	10.429.000			

5.2.2.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	10.429.000			
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.638.793.200</b>	<b>1.097.759.766,00</b>	<b>1.451.449.934,00</b>	<b>43,06</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>-2.638.793.200</b>	<b>-1.097.759.766,00</b>	<b>-1.451.449.934,00</b>	<b>43,06</b>

## 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 2.363.635.100 dan terealisasi sebesar Rp1.175.614.168 sisa sebesar Rp1.188.020.932 atau tercapai sebesar 49,7%.

**Outcome Program** adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.299.400 dan terealisasi sebesar Rp 858.000 sisa sebesar Rp441.400 atau tercapai sebesar 51,4%.

**Output kegiatan** adalah jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan.

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 441.400 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sisa sebesar Rp 441.400 atau tercapai sebesar 0,00%.

**Output Sub Kegiatan** adalah tersusunnya dokumen perencanaan sektoral, dengan target sebanyak 2 dokumen dan dokumen perencanaan perangkat daerah yang sudah tersusun sebanyak 0 Dokumen.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar realisasinya Rp. 858.000 dan terealisasi sebesar Rp 858.000 sisa sebesar Rp 0,00 atau tercapai sebesar 100%.

**Output Sub Kegiatan** adalah tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja, dengan target sebanyak 15 Laporan dan Laporan Capaian Kinerja yang sudah disusun sebanyak 15 Laporan.

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.214.051.700 dan terealisasi sebesar Rp 1.112.035.068 sisa sebesar Rp 1.102.016.632 atau tercapai sebesar 50,2%.

**Output kegiatan** adalah jumlah pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.212.646.100 dan terealisasi sebesar Rp 1.110.994.068 sisa sebesar Rp 1.101.652.032 atau tercapai sebesar

50,1%.

**Output Sub Kegiatan** adalah Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan dengan sebanyak 12 Pegawai dan telah terealisasi sebanyak 12 Pegawai.

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 491.000 dan terealisasi sebesar Rp 491.000 sisa sebesar Rp0,00 atau tercapai sebesar 100,00%.

**Output Sub Kegiatan** adalah jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan dengan sebanyak 1 Laporan dan telah terealisasi sebanyak 1 Laporan.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 914.600 dan terealisasi sebesar Rp 550.000 sisa sebesar Rp 364.600,00 atau tercapai sebesar 60,1%.

**Output Sub Kegiatan** adalah jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang dihasilkan dengan target sebanyak 18 Laporan dan telah terealisasi sebanyak 9 laporan.

- C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.278.800 dan terealisasi sebesar Rp11.001.600 sisa sebesar Rp 23.277.200 atau tercapai sebesar 32,1%.

**Output kegiatan** adalah jumlah Bahan/Material yang disediakan.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.189.700 dan terealisasi sebesar Rp 228.700 sisa sebesar Rp 961.000 atau tercapai sebesar 19,2%.

**Output Sub Kegiatan** adalah jumlah instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan dengan target sebanyak 9 Paket dan telah terealisasi sebanyak 3 Paket.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.429.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.483.000 sisa sebesar Rp 7.946.000 atau tercapai sebesar 23,8%.

**Output Sub Kegiatan** adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan dengan target Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 Paket dan telah terealisasi sebanyak 0 Paket.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 2.696.200 dan terealisasi sebesar Rp 966.000 sisa sebesar Rp 1.730.200 atau tercapai sebesar 35,8%.

**Output Sub Kegiatan** adalah jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan target 4 Paket dan telah terealisasi sebanyak 4 Paket.

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000 dan terealisasi sebesar Rp 724.000 sisa sebesar Rp 776.000 atau tercapai sebesar 48,2%.

**Output Sub Kegiatan** adalah jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan target sebanyak 2 Dokumen dan telah terealisasi sebanyak 2 Dokumen.

- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.664.300 dan terealisasi sebesar Rp 5.455.700 sisa sebesar Rp 7.208.600 atau tercapai sebesar 43%.

**Output Sub Kegiatan** adalah jumlah Bahan/Material yang disediakan dengan target sebanyak 23 Paket dan telah terealisasi sebanyak 12 Paket.

- f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran sebesar 4.500.000 dan terealisasi sebesar Rp375.000 sisa sebesar Rp 4.125.000 atau tercapai sebesar 8%.

**Output Sub Kegiatan** adalah jumlah Snack Tamu yang tersedia dengan target sebanyak 11 Laporan dan telah terealisasi sebanyak 1 Laporan.

- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.299.600 dan terealisasi sebesar Rp 769.200 sisa sebesar Rp 530.400 atau tercapai sebesar 59,2%.

**Output Sub Kegiatan** adalah jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan target sebanyak 8 Laporan dan telah terealisasi sebanyak 4 Laporan.

D. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.440.100 dan terealisasi sebesar Rp12.498.800 sisa sebesar Rp17.941.300 atau tercapai sebesar 41,1%.

**Output kegiatan** adalah jumlah Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dibayarkan.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.082.200 dan terealisasi sebesar Rp 9.864.700 sisa sebesar Rp 13.217.500 atau tercapai sebesar 41%.

**Output Sub Kegiatan** adalah tersedianya jasa layanan telekomunikasi, air, listrik selama 1 tahun dengan target sebanyak 1 Laporan dan telah terealisasi sebanyak 0 Laporan.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.357.900 dan terealisasi sebesar Rp 2.634.100 sisa sebesar Rp 3.723.800 atau tercapai sebesar 37,2%.

**Output Sub Kegiatan** adalah jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target sebanyak 3 Laporan dan telah terealisasi sebanyak 1 Laporan.

- E. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 83.565.100 dan terealisasi sebesar Rp. 39.220.700 sisa sebesar Rp 44.344.400 atau tercapai sebesar 46,9%.

**Output kegiatan** adalah jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.671.000 dan terealisasi sebesar Rp18.468.500 sisa sebesar Rp 20.202.500 atau tercapai sebesar 47,8%.

**Output Sub Kegiatan** adalah jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dengan target sebanyak 8 Unit dan telah terealisasi sebanyak 8 Unit.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.786.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.104.200 sisa sebesar Rp 2.681.800 atau tercapai sebesar 44%.

**Output Sub Kegiatan** adalah jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perijinannya dengan target sebanyak 4 Unit dan telah terealisasi sebanyak 2 Unit.

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.108.100 dan terealisasi sebesar Rp 18.648.000 sisa sebesar Rp21.460.100 atau tercapai sebesar 46,5%.

**Output Sub Kegiatan** adalah Jumlah gedung kantor yang dipelihara dengan target sebanyak 1 Unit dan telah terealisasi sebanyak 1 Unit.

Dalam melaksanakan urusan yang melekat di Perangkat Daerah (Non Urusan), Kecamatan Gunungjati perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

### 1. Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan

#### 1) Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pelaksanaan fungsi penunjang ini merupakan tugas utama dari Kecamatan Gunungjati Dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang ini, Kecamatan Gunungjati melaksanakan 5 (lima) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 8 (delapan) Sub Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan  
Kecamatan Gunungjati  
Tahun Anggaran 2023 Semester 1**

NO	Uraian Urusan, Perangkat Daerah, Bidang/Bagian, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	JUMLAH ALOKASI (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	%
<b>URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN</b>				
<b>KECAMATAN GUNUNGGJATI</b>				
1	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>142.794.400</b>	<b>45.562.500</b>	<b>31,9</b>
1	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>31.618.600</b>	<b>25.124.500</b>	<b>79,5</b>
(1)	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.380.000,00	2.025.000,00	10,00
2	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>41.525.200</b>	<b>20.248.000</b>	<b>48,00</b>
(1)	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	41.525.200	20.248.000	48,00
3	<b>Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>69.650.600</b>	<b>190.000</b>	<b>0,3</b>
(1)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	69.650.600	190.000	0,3
2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>49.416.100</b>	<b>12.613.800</b>	<b>25,5</b>
1	<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>49.416.100</b>	<b>12.613.800</b>	<b>25,5</b>
(1)	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49.416.100	12.613.800	25,5
3	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>78.888.800</b>	<b>23.379.200</b>	<b>30,00</b>
1	<b>Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1)	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	30.000.000,00	0,00	0,00
2	<b>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>48.888.800</b>	<b>23.479.200</b>	<b>48,00</b>
(1)	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	48.888.800	23.479.200	48,0
4	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>4.058.800</b>	<b>1.379.600</b>	<b>34,0</b>
1	<b>Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>4.058.800</b>	<b>1.379.600</b>	<b>34,0</b>
(1)	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4.058.800	1.379.600	34,0

Rincian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan ialah sebagai berikut:

**(1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 142.794.400 dan terealisasi sebesar Rp 45.526.500 sisa sebesar Rp 97.231.900 atau tercapai sebesar 31,9%.

**Outcome Program** adalah Persentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.618.600 dan terealisasi sebesar Rp 25.124.500 sisa sebesar Rp6.494.100 atau tercapai sebesar 79,5%.

**Output kegiatan** adalah tersedianya jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan.

a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan Alokasi dana sebesar Rp. 22.499.800 dengan realisasinya Rp. 19.649.800 Dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.850.000 atau tercapai sebesar 87,3%.

**Sub Output** : Jumlah laporan hasil koordinasi pemerintahan

b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.118.800 dan terealisasi sebesar Rp. 5.474.700 sisa sebesar Rp 3.644.100 atau tercapai sebesar 60%.

**Output Sub Kegiatan** adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.525.200 dan terealisasi sebesar Rp 20.248.000 sisa sebesar Rp 21.772.200 atau tercapai sebesar 48,8%.

**Output kegiatan** adalah Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 41.525.200 dan terealisasi sebesar Rp 20.248.000 sisa sebesar Rp 21.772.200 atau tercapai sebesar 48,8%.

**Output Sub Kegiatan** adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.650.600 dan terealisasi sebesar Rp 190.000 sisa sebesar Rp 69.460.600 atau tercapai sebesar 0,3%.

**Output kegiatan** adalah Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.650.600 dan terealisasi sebesar Rp 190.000 sisa sebesar Rp 69.460.600 atau tercapai sebesar 0,3%.

**Output kegiatan** adalah Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat.

#### **B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 49.416.100 dan terealisasi sebesar Rp 12.613.800 sisa sebesar Rp 36.802.300 atau tercapai sebesar 25,5%.

**Outcome Program** adalah Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:



1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.416.100 dan terealisasi sebesar Rp Rp 12.613.800 sisa sebesar Rp 36.802.300 atau tercapai sebesar 25,5%.

**Output kegiatan** adalah Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp43.718.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 49.416.100 dan terealisasi sebesar Rp Rp 12.613.800 sisa sebesar Rp 36.802.300 atau tercapai sebesar 25,5%.

**Output Sub Kegiatan** adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

### C. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp78.190.800,00 dan terealisasi sebesar Rp. 23.479.200 sisa sebesar Rp 55.409.600 atau tercapai sebesar 30%.

**Outcome Program** adalah Prosentase Kegiatan Koordinasi untuk Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sisa sebesar Rp30.000.000,00 atau tercapai sebesar 0,00%.

**Output kegiatan** adalah jumlah rapat Koordinasi dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

- a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran Rp30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00 sisa sebesar Rp30.000.000,00 atau tercapai sebesar 0,00%.
- b. **Output Sub Kegiatan** adalah Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.
2. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar 48.888.800 dan terealisasi sebesar Rp 23.479.200 sisa sebesar Rp 25.409.600 atau tercapai sebesar 48%.

**Output kegiatan** adalah Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

- a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.888.800,00 dan terealisasi sebesar Rp 23.479.200 sisa sebesar Rp 25.409.600 atau tercapai sebesar 48%.

**Output Sub Kegiatan** adalah Jumlah Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan.

#### **D. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar . 4.058.800 dan terealisasi sebesar Rp 1.379.600 sisa sebesar Rp 2.679.200 atau tercapai sebesar 34%.

**Outcome Program** adalah Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar 4.058.800 dan terealisasi sebesar Rp 1.379.600 sisa sebesar Rp 2.679.200 atau tercapai sebesar 34%.

**Output kegiatan** adalah Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan alokasi anggaran sebesar 44.058.800 dan terealisasi sebesar Rp 1.379.600 sisa sebesar Rp 2.679.200 atau tercapai sebesar 34%.

**Output Sub Kegiatan** adalah Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pemilihan Kuwu).

#### **2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunungjati**

Secara umum, sebagian besar pelayanan di Kantor Kecamatan Gunungjati dapat berjalan sesuai dengan target. Keuangan sebagai salah satu sumber daya instansi merupakan aspek penting dalam menunjang pelayanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Kinerja pelayanan suatu SKPD turut dipengaruhi oleh kapasitas keuangan di dalam Perangkat Daerah tersebut. Jumlah anggaran Kantor Kecamatan Gunungjati dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pasang surut disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah Kabupaten Cirebon.

Pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Gunungjati dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024.

Kondisi masyarakat yang selalu dinamis menuntut adanya pelayanan publik yang prima dan berkembang sesuai tuntutan perubahan waktu. Kondisi lingkungan eksternal ini akan berimplikasi sebagai peluang dan tantangan bagi pengembangan pelayanan SKPD pada 5 (lima) tahun mendatang. Analisis lingkungan eksternal tersebut dilakukan salah satunya melalui telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon. Untuk analisis Renstra K/L, SKPD Provinsi dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Cirebon tidak dapat dilakukan karena ketidaksediaan data.

Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kantor Kecamatan Gunungjati berupa arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Hasil telaahan struktur dan pola ruang terhadap pelayanan di Kecamatan Gunungjati dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah  
Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon**

<b>No</b>	<b>Rencana Struktur</b>	<b>Struktur Ruang Saat ini</b>	<b>Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan</b>	<b>Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan</b>	<b>Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Ruas-Ruas Jalan	Ruas Jalan Kabupaten	Pengembangan jalan lingkungan berhotmix dan bebas banjir	Ada, fasilitasi dan koordinasi monitoring dan inventarisasi data jalan lingkungan yang belum termasuk dalam ruas jalan kabupaten	Wilayah Kecamatan Gunungjati
2.	Kawasan Perlindungan Setempat	Sempadan Sungai (Non Hutan)	Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan sekitarnya	Ada, fasilitasi dan koordinasi monitoring dan inventarisasi data drainase	
3.	Kawasan Kearifan Lokal	Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (Non Hutan)		Ada, Inventarisir Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	
4.	Sistem Perkotaan	Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan Sistem Perdesaan</li> <li>- Pengembangan fasilitas umum</li> <li>- Pengembangan perdagangan eceran, grosir, pasar dan sejenisnya</li> </ul>	Ada, fasilitasi pendataan dan pembinaan usaha informal dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban wilayah	
5.	Pusat Lingkungan	kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Penataan kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Ada, fasilitasi dan koordinasi monitoring dan inventarisasi data tata bangunan dan pengawasan kebersihan lingkungan	
6.	Kawasan rawan Bencana	Pemukiman		Ada, koordinasi penanggulangan bencana alam	Wilayah Kecamatan Gunungjati

7.	Kawasan Perumahan	Perumahan	Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan	Ada, fasilitasi dan koordinasi monitoring dan inventarisasi data pemukiman yang belum memiliki listrik	
9.	Kawasan industri	Home Industri	Mengembangkan sarana dan prasarana di kawasan yang memiliki strategis ekonomi	Ada, Fasilitasi Pembentukan Kawasan Wirausaha Sentra Batik	Kecamatan Gunungjati

Dari tabel tersebut di atas, bila dikaitkan dengan tugas pokok dan kewenangan yang ada di kecamatan maka pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan terdapat banyak peluang dan tantangan pelayanan yang harus dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Gunungjati. Peluang dan tantangan terbesar ke depan adalah terkait rencana pengembangan kawasan industri menengah di Kecamatan Gunungjati. Sebagai pusat Kawasan Wirausaha Sentra Batik dan Kuliner yang memerlukan pembangunan sarana dan prasarana serta dampaknya terkait dengan pelayanan yang terdapat di Kecamatan Gunungjati.

Peluang dan tantangan pelayanan tersebut harus dilaksanakan dalam rangka perwujudan pola ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kecamatan Gunungjati, yaitu antara lain :

1. Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Masalah Sosial.
2. Monitoring dan Inventarisasi Data Jalan Umum dan Jalan Lingkungan serta Data Drainase.
3. Pengawasan Kebersihan Lingkungan.
4. Inventarisir Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
5. Fasilitasi Dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Pemukiman yang Belum Memiliki Listrik
6. Pelayanan Fasilitasi dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Tata Bangunan,
7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah, Serta
8. Fasilitasi Pendataan dan Pembinaan Usaha Formal.

Peluang dan tantangan pengembangan pelayanan tersebut diarahkan di seluruh Desa di Kecamatan Gunungjati.

### **2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Gunungjati**

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukandalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Perangkat Daerah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah di masa lima tahun mendatang. Permasalahan pelayanan Kecamatan Gunungjati berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon**

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Kinerja Pelayanan SKPD	Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintah Kecamatan Kepada Masyarakat	RENSTRA Kecamatan Gunungjati 2019-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan Komunikasi dengan Pihak Terkait</li> <li>- Pengembangan Data dan Informasi Pelayanan yang Akurat</li> <li>- Optimalisasi Penataan Kualitas Pelayanan Publik Baik Sarana Prasarana Maupun Sumber Daya Aparatur Pelaksana</li> <li>- Pengembangan Kinerja Pelayanan yang Memenuhi Azas, Prinsip dan Standar Pelayanan Publik</li> <li>- Pembinaan Tertib Administrasi Perkantoran</li> </ul>	Pembinaan dan Bimbingan pelaksanaan tugas dan kewenangan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan komunikasi yg belum optimal sehingga pelayanan masih terbatas</li> <li>- Sosialisasi Pelayanan terhadap masyarakat belum efektif</li> <li>- Fasilitas penunjang pelayanan terbatas</li> </ul>
	Pemeliharaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur		Pemeliharaan dan Inventarisir Sarana dan Prasaran Aparatur		Pemanfaatan Aset dan sistem informasi yang ada belum optimal
	Meningkatkan Kedisiplinan, Kerapihan dan Ketertiban Aparatur		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Metode dan Etos Kerja Aparatur	Peraturan Kepegawaian	Mekanisme Pembinaan melalui pemberian Hukuman ataupun Penghargaan belum berjalan optimal
	Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	Peraturan Keuangan	SDM aparatur yg memiliki kinerja dan memahami aturan keuangan terbatas
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		Pengembangan Sistem Perencanaan yang terarah dan terukur	Peraturan Perencanaan an Anggaran	Kualitas SDM aparatur yg memahami perencanaan & aturan

	Melaksanakan Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat dengan Memperhatikan Situasi dan Potensi yang ada di Wilayah Kecamatan</li> <li>- Pengembangan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat Pembangunan bagi Masyarakat</li> <li>- Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan serta Memfasilitasi Kegiatan Pemerintah Desa</li> </ul>	Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum meratanya Insfrastruktur Wilayah seperti jalan dan jaringan</li> <li>- Koordinasi dan komunikasi dgn pihak terkait belum efektif sehingga masyarakat tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan</li> </ul>
--	---	--	--	--	---

Dari tabel tersebut diatas terlihat kelemahan internal pelayanan di Kecamatan Gunungjati berdasarkan tugas pokok dan fungsinya memiliki beberapa faktor yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut antara lain :

1. Koordinasi dan komunikasi yang belum optimal sehingga pelayanan masih terbatas.
2. Sosialisasi Pelayanan terhadap masyarakat belum efektif.
3. Fasilitas penunjang pelayanan terbatas.
4. Pemanfaatan Aset dan sistem informasi yang ada belum optimal.
5. Mekanisme Pembinaan melalui pemberian Hukuman ataupun Penghargaan belum berjalan optimal.
6. Sumber Daya Manusia aparatur yang memiliki kinerja dan memahami aturan keuangan terbatas.
7. Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur yang memahami perencanaan dan aturan anggaran terbatas
8. Belum meratanya Insfrastruktur Wilayah seperti jalan dan jaringan.
9. Koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait belum efektif sehingga masyarakat tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan.

#### **2.4. . Penelaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**

Perencanaan dan Penganggaran merupakan suatu kesatuan dan proses yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan. Mekanisme perencanaan pembangunan dimulai dari penjaringan aspirasi masyarakat dan pengkajian kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa yang dilanjutkan dengan musyawarah Perencanaan di tingkat Kecamatan. Proses perencanaan di Kecamatan Gunungjati ada 4 (empat) tahapan perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Penyusunan Rencana
2. Penetapan Rencana
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Isu–isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

#### 3.1. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi SKPD dan memiliki keterkaitan dengan visi SKPD yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Kriteria dalam perumusan sasaran yakni:

- a. *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b. *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
- c. *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- d. *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
- e. *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
- f. *Continuously improve* (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD Kantor Kecamatan Gunungjati dapat dilihat pada tabel sebagaimana terlampir.



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GUNUNGGJATI**

#### **4.1. Program Dan Kegiatan Tahun 2023**

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Program Kerja dan Kegiatan Kecamatan Gunungjati Mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel terlampir.

Urusan Kewenangan Kantor Camat Gunungjati pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi urusan wajib adalah:

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2. Kepemudaan dan Olahraga
3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Kependudukan

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan terangkum dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon dengan 6 (enam) indikator kinerja Kantor Kecamatan Gunungjati dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah sampai dengan Tahun 2024, adapun Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Kecamatan Gunungjati Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel Berikut :



**RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**PERANGKAT DAERAH: 7-1.0-0.0-0.33.**

**PERANGKAT DAERAH: 7-1.0-0.0-0.23. KECAMATAN GUNUNGJATI**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
<b>7.</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					2.587.619.838	2.828.788.200	241.168.362		
<b>7.01.</b>	<b>KECAMATAN</b>					2.587.619.838	2.828.788.200	241.168.362		
<b>7.01.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatnya Prosentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintahan		100 Prosen	100 Prosen	2.300.178.938	2.553.630.100	253.451.162		
<b>7.01.01.2.01.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang dihasilkan		6 Jenis	6 Jenis	1.299.400	1.299.400	-		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- (- Kecamatan Gunungjati)	2 Dokumen	2 Dokumen	588.600	441.400	(147.200)	PIS	PIS
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- (- Kecamatan Gunungjati)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- (- Kecamatan Gunungjati)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- (- Kecamatan Gunungjati)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- (- Kecamatan Gunungjati)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- (- Kecamatan Gunungjati)	15 Dok	15 Dok	858.000	858.000	-	PIS	PIS
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- (- Kecamatan Gunungjati)	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-		PIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
<b>7.01.01.2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan pengadministrasian keuangan		3 Dok	3 Dok	2.214.051.700	2.154.046.700	(60.005.000)		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gajidan, Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon ( - Kecamatan gunungjati)	16 Dok	16 Dok	2.161.472.900	2.152.641.100	(8.831.800)	PIS	PIS
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- ( - Kecamatan gunungjati)	1 Laporan	1 Laporan	491.000	491.000	-	PIS	PIS
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis, Prognosis Realisasi Anggaran	- ( - Kecamatan gunungjati)	18 Dokumen	18 Dokumen	914.600	914.600	-	PIS	PIS
<b>7.01.01.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah pegawai yang teradministrasi dengan baik		25 Org	25 Org	-	-	-		
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut, Kelengkapan	- ( - Kecamatan gunungjati)	1 Paket	1 Paket	-	-	-		PIS
<b>7.01.01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan		8 Jenis	8 Jenis	34.278.800	34.278.800	-		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi, Listrik/Penerangan Bangunan Kantoryang Disediakan	- ( - Kecamatan gunungjati)	10 jenis	10 jenis	1.189.700	1.189.700	-	PIS	PIS
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan, Kantor yang Disediakan	- ( - Kecamatan gunungjati)	7 Paket	7 Paket	10.429.000	10.429.000	-	PIS	PIS
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantoryang, Disediakan	- ( - Kecamatan gunungjati)	300 Paket	300 Paket	260.000	-	(260.000)		PIS
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan, yang Disediakan	- ( - Kecamatan gunungjati)	16 Paket	16 Paket	2.696.200	2.696.200	-	PIS	PIS
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan, yang Disediakan	-	2 Paket	2 Paket	1.500.000	1.500.000	-	PIS	PIS
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	- ( - Kecamatan gunungjati)	28 Paket	28 Paket	12.664.300	12.664.300	-	PIS	PIS
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- ( - Kecamatan gunungjati)	300 Laporan	300 Laporan	1.500.000	4.500.000	3.000.000	PIS	PIS
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- ( - Kecamatan gunungjati)	80 Laporan	80 Laporan	1.299.600	1.299.600	-	PIS	PIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
<b>7.01.01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah barang milik daerah yang diadakan		4 Jenis	4 Jenis	-	250.000.000	250.000.000		
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- ( - Kecamatan gunungjati)	4 Unit	4 Unit	-	250.000.000	250.000.000		PIS
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau, Lapangan yang Disediakan	- ( - Kecamatan gunungjati)	4 Unit	4 Unit	-	-	-		PIS
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		7 Unit	7 Unit	-	-	-		PIS
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- ( - Kecamatan gunungjati)	1 Unit	1 Unit	-	-	-		PIS
<b>7.01.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan		2 Jenis	2 Jenis	30.440.100	30.440.100	-		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- ; - ( - Kecamatan gunungjati)	1 Laporan	1 Laporan	14.392.038	24.082.200	9.690.162	PIS	PIS
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan, Perlengkapan Kantoryang Disediakan		5 Laporan	5 Laporan	6.357.900	6.357.900	-	PIS	PIS
<b>7.01.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		5 Jenis	5 Jenis	83.565.100	83.565.100	-		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- ( - Kecamatan gunungjati)	10 Unit	10 Unit	38.671.000	38.671.000	-	PIS	PIS
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	- ( - Kecamatan gunungjati)	1 Unit	1 Unit	4.786.000	4.786.000	-	PIS	PIS
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara.	- ( - Kecamatan gunungjati)	6 Unit	6 Unit	-	-	-		PIS
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, yang Dipelihara/Direhabilitasi	- ( - Kecamatan gunungjati)	1 Unit	1 Unit	-	-	-		PIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- (- Kecamatan gunungjati)	8 Unit	8 Unit	40.108.100	40.108.100	-	PIS	PIS
<b>7.01.02.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Prosen	100 Prosen	150.117.200	142.794.400	(7.322.800)		
<b>7.01.02.2.01.</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan		2 Jenis	2 Jenis	31.618.600	31.618.600	-		
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	- (Desa Klayan - Kecamatan gunungjati)	4 Laporan	4 Laporan	22.499.800	22.499.800	-	PIK	PIK, PIS
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kabupaten Cirebon (- Kecamatan gunungjati)	12 Dokumen	12 Dokumen	9.418.800	9.118.800	(300.000)	PIS	PIS
<b>7.01.02.2.02.</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.		3 kegiatan	3 kegiatan	41.525.200	41.525.200	-		
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jl. Raya Sunan Gunung Jati No.203 Desa klayan (Desa Klayan - Kecamatan gunungjati)	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-		PIS
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- ; Kabupaten Cirebon (- Kecamatan gunungjati)	12 laporan	12 laporan	42.494.800	41.525.200	(969.600)	PIS	PIS
<b>7.01.02.2.04.</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Jumlah jenis urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat		3 Jenis	3 Jenis	69.650.600	69.650.600	-		
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	- (- Kecamatan gunungjati)	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan, pada Urusan Pemerintahan	- (- Kecamatan gunungjati)	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-		PIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	- ; Kabupaten Cirebon ( - Kecamatan gunungjati)	12 Laporan	12 Laporan	75.703.800	69.650.600	(6.053.200)	PIS	PIS
<b>7.01.03.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan		100 Prosen	100 Prosen	49.416.100	49.416.100	-		
<b>7.01.03.2.01.</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		2 Jenis	2 Jenis	49.416.100	49.416.100	-		
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah, Perencanaan Pembangunan di Desa	- ( - Kecamatan gunungjati)	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-		PIS
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	- (Desa Klayan - Kecamatan gunungjati)	4 Dok	4 Dok	-	-	-		PIS
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	- ; - ( - Kecamatan gunungjati)	12 Laporan	12 Laporan	49.416.100	49.416.100	-	PIK, PIS	PIK, PIS
<b>7.01.04.</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Prosentase Kegiatan Koordinasi untuk Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100 Prosen	100 Prosen	83.848.800	78.888.800	(4.960.000)		
<b>7.01.04.2.01.</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Jumlah rapat koordinasi dalam penyelenggaraan trantibum		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	30.000.000	-		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di, Wilayah Kecamatan	-	3 Laporan	3 Laporan	30.000.000	30.000.000	-	PIS	PIS
<b>7.01.04.2.02.</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1 BA	1 BA	48.888.800	48.888.800	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik, Indonesia	Kabupaten Cirebon ( - Kecamatan gunungjati)	12 Laporan	12 Laporan	53.848.800	48.888.800	(4.960.000)	PIS	PIS
<b>7.01.05.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Prosentase urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat		100 Prosen	100 Prosen	-	-	-		
<b>7.01.05.2.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		8 Laporan	8 Laporan	-	-	-		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan, Ketahanan Nasional	- ( - Kecamatan gunungjati)	100 Orang	100 Orang	-	-	-		PIS
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa	- ( - Kecamatan gunungjati)	50 Orang	50 Orang	-	-	-		PIS
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi, Pimpinan di Kecamatan	- ( - Kecamatan gunungjati)	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-		PIS
<b>7.01.06.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Peningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa		100 Prosen	100 Prosen	4.058.800	4.058.800	-		
<b>7.01.06.2.01.</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		8 Jenis	8 Jenis	4.058.800	4.058.800	-		
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan, Kepala Desa	- ( - Kecamatan gunungjati)	24 Dokumen	24 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	- ( - Kecamatan gunungjati)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan, Aset Desa	- ( - Kecamatan gunungjati)	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka, Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	- ( - Kecamatan gunungjati)	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-		PIS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	- ; - ( - Kecamatan gunungjati)	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	- ( - Kecamatan gunungjati)	15 Dokumen	15 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	- ( - Kecamatan gunungjati)	8 Dokumen	8 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan, Desa	- ( - Kecamatan gunungjati)	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan, Kawasan Perdesaan	- ( - Kecamatan gunungjati)	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan, Pihak Ketiga	- ( - Kecamatan gunungjati)	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan, Batas Desa	- ( - Kecamatan gunungjati)	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-		PIS
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka, Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	- ( - Kecamatan gunungjati)	12 Dokumen	12 Dokumen	4.058.800	4.058.800	-	PIS	PIS
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaandi Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah, Kecamatan	- ( - Kecamatan gunungjati)	4 Laporan	4 Laporan	-	-	-		PIS
<b>J U M L A H</b>						<b>2.587.619.838</b>	<b>2.828.788.200</b>	<b>241.168.362</b>		



## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Catatan penting**

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Gunungjati di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Gunungjati sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gunungjati yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Gunungjati demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Perangkat Daerah Kecamatan Gunungjati, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Gunungjati merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggungjawabkan dalam realisasi pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil Aparatur.


## 5.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gunungjati dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD. Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan tahun anggaran 2023, Kecamatan Gunungjati telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2023, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

## 5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Gunungjati pada Tahun 2023 menetapkan 5 program dan 14 kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gunungjati Tahun 2023 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam 1 (satu) Tahun kedepan. Demikian rencana kerja perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Gunungjati Tahun 2023 yang telah kami susun berdasarkan perubahan Renstra, isu – isu strategis dan catatan penting serta program dan kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun secara umum rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Gunungjati tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

BUPATI CIREBON,



IMRON